

# DEMOKRASI DAN FUNDAMENTALISME AGAMA: HINDU DI INDIA, BUDDHA DI SRI LANKA, DAN ISLAM DI TURKI\*

Indriana Kartini

## Abstract

*Fundamentalism is a phenomenon appears in every tradition of world religions, such as Christian, Jews, Islam, Hindu and Buddha. In the last few decades, fundamentalism has been played significant role in global politics, especially in its interaction with democracy in some countries. Fundamentalism appears based on some factors, not only related to religious issue, but also cultural, social politics and ideology issue. As an ideology, the goal of fundamentalism are to manage political system, economic resources and social power of a country based on religion. This research examines why fundamentalism trend raised in countries like India, Sri Lanka dan Turkey that uphold democracy? What are the main factors that influence fundamentalism trend in these countries? Is there any correlation between fundamentalism reality with development of democracy in these countries?*

**Keywords:** *Global politics, fundamentalism, democracy, Hindu, Buddha, Islam, India, Sri Lanka, Turkey*

## Abstrak

Fundamentalisme adalah fenomena yang ada di setiap tradisi agama dunia seperti Kristen, Yahudi, Islam, Hindu, dan Buddha. Dalam beberapa dekade terakhir, fundamentalisme memainkan peran penting dalam politik global, khususnya dalam interaksi dengan demokrasi di beberapa negara. Fundamentalisme muncul disebabkan oleh beberapa faktor, tidak hanya terkait dengan persoalan agama, namun juga kultural, sosial politik, dan ideologi. Sebagai sebuah ideologi, tujuan fundamentalisme adalah untuk mengatur sistem politik, sumber daya ekonomi dan kekuatan sosial sebuah negara berdasarkan agama. Penelitian ini mengkaji mengapa tren fundamentalisme meningkat di negara-negara seperti India, Sri Lanka, dan Turki yang menganut paham demokrasi? Apakah ada korelasi antara realitas fundamentalisme dengan perkembangan demokrasi di negara-negara tersebut?

**Kata kunci:** Politik global, fundamentalisme, demokrasi, Hindu, Buddha, Islam, India, Sri Lanka, Turki

## Pendahuluan

Demokrasi sebagai rasionalitas politik dalam sistem politik dunia modern saat ini tengah mengalami krisis. Hal ini terkait dengan realitas kekecewaan masyarakat terhadap paham-paham pemikiran Barat yang berkembang, seperti liberalisme/kapitalisme dan sosialisme/komunisme. Runtuhnya komunisme serta kegagalan kapitalisme dalam menyelesaikan problematika sosial, budaya, ekonomi, dan politik memungkinkan munculnya alternatif paham pemikiran yang berbeda dari demokrasi Barat. Dalam tradisi demokrasi, terdapat aspek partisipasi di mana

setiap nilai maupun paham pemikiran berhak berkompetisi. Oleh karena itu, di tengah tren demokrasi memungkinkan pula berkembangnya nilai-nilai maupun paham pemikiran alternatif.

Munculnya tren fundamentalisme agama merupakan salah satu fenomena yang terjadi di beberapa negara yang menganut paham demokrasi. Fenomena politik agama ini muncul sebagai upaya koreksi terhadap demokrasi Barat yang memisahkan antara domain politik dengan domain agama. Fenomena fundamentalisme agama ini berusaha memasukkan nilai-nilai atau pemahaman agama ke dalam realitas politik. Fenomena fundamentalisme ini terjadi di beberapa agama, bukan hanya fenomena eksklusif suatu agama tertentu. Misalnya fundamentalisme Hindu di India, fundamentalisme Buddha di Sri

\* Penelitian ini dilakukan oleh Indriana Kartini (Koordinator), Riza Sihbudi, Hamdan Basyar, Dhurorudin Mashad, M. Fakhry Ghafur.

Lanka serta fundamentalisme Islam di Turki. Meski dilandasi oleh alasan yang sama, yakni kekecewaan komunitas religius terhadap penguasa korup dan despotik. Namun, fundamentalisme di negara-negara tersebut memiliki keunikan tersendiri yang dipengaruhi oleh kondisi politik, budaya, dan agama tiap-tiap negara.

Sejak awal berdiri pada 1947, India menganut paham demokrasi dalam sistem politiknya. Dalam proses pembentukan karakter demokrasi-nya, India mengalami berbagai tantangan. Struktur sosial India yang didasari pembedaan kasta menimbulkan ironi bagi kelangsungan demokrasi yang mengusung nilai-nilai egalitarian. Sementara itu, munculnya fundamentalisme yang berpilin dengan nasionalisme agama Hindu mengikis nilai-nilai demokrasi yang sejatinya menciptakan pluralitas dalam struktur masyarakat egalitarian. Fenomena fundamentalisme ini berakar dari gerakan modernisme religius pada abad ke-19 sekaligus alternatif terhadap organisasi nasionalisme sekuler Kongres Nasional India (*Indian National Congress*) yang kemudian berubah menjadi Partai Kongres.

Sementara itu, fundamentalisme agama Buddha terjadi di Sri Lanka, di mana doktrin Buddha yang bersifat inklusif dan nonmilitan bertransformasi menjadi gerakan militan dalam menghadapi komunitas Tamil-Hindu sebagai kelompok minoritas terbesar yang dianggap sebagai ancaman terhadap eksistensi kelompok mayoritas Sinhala-Budhist. Para biksu Buddha di Sri Lanka telah mentransformasikan segmen “sangha” atau “*monastic order*” menjadi kekuatan religius dan nasionalisme kultural.

Seperti gerakan fundamentalis lainnya, fundamentalisme Sinhala-Budhist didasarkan pada ajaran agama Buddha. Fundamentalisme Sinhala-Budhist mengidentifikasi Budhist-Sinhala sebagai orang-orang terpilih Buddha untuk mempertahankan dan melindungi ajaran agama Buddha. Lebih lanjut, mereka mengidentifikasi Pulau Sri Lanka sebagai *dhammadipa*, pulau “dhamma” (ajaran Buddha). Identitas antara orang Sinhala dan “dhamma”, yang didasarkan pada “*mythohistory*” Sri Lanka abad ke-5, yakni “Mahavamsa”, memberikan kepercayaan bahwa Sri Lanka ditakdirkan menjadi pulau “dhamma” yang harus didominasi oleh penganut

agama Buddha.<sup>1</sup> Fundamentalis Sinhala-Budhist kemudian mempersepsikan kelompok minoritas lainnya, seperti Tamil, juga Muslim dan Burghers (keturunan Eropa beragama Kristen) sebagai orang asing yang mengancam eksistensi mereka.

Fenomena munculnya fundamentalisme agama juga terjadi di Turki. Sejak dihapuskannya sistem kekhalifahan pada 1920-an oleh pemerintahan Kemal Attaturk, Turki kemudian menjadi negara yang menganut paham sekularisme. Sejak saat itu, ideologi negara Turki tidak lagi dilandaskan pada ajaran Islam, melainkan berganti dengan paham demokrasi liberal. Hingga saat ini, Turki menjalankan sistem demokrasi dan kapitalisme yang dapat dikatakan semakin jauh dari tradisi politik Islam di masa kekhalifahan Ottoman. Pada periode 1970–1980, terjadi perkembangan politik yang dramatis di Turki, yakni terjadi upaya restorasi identitas keislaman. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketegangan dan kompetisi antara kelompok sekuler dengan kelompok Islam terutama dalam hal kontrol atas kekuasaan negara.<sup>2</sup> Bangkitnya kesadaran Islam yang merupakan identitas bersama di antara massa menjelma menjadi kesadaran nasional. Muslim dari kelompok semi-urban dan rural mulai menggunakan beragam kategori kultural untuk mengkonstruksi identitas baru dalam menghadapi tantangan industrialisasi serta ekspansi kekuasaan negara dengan membentuk Partai Keadilan (*the Justice Party/JP*).

Berbagai realitas dari marak dan kian kuatnya tren fundamentalisme agama ini menjadi permasalahan penting yang hendak dicermati. Terdapat beberapa pertanyaan yang akan dianalisis, yaitu 1) Mengapa tren fundamentalisme menguat di India, Sri Lanka, dan Turki yang menganut paham demokrasi? 2) Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi menguatnya tren fundamentalisme di India, Sri Lanka dan Turki? 3) Adakah korelasi antara realitas fundamentalisme dengan perkembangan demokrasi di India, Sri Lanka, dan Turki?

<sup>1</sup> Lihat, Tessa J. Bartholomeusz & Chandra R. de Silva, *Buddhist Fundamentalism and Identity in Sri Lanka*, (London: Suny Press, 1998), hlm. 2.

<sup>2</sup> Lihat Feroz Ahmad, “Islamic Reassertion in Turkey Source: Third World Quarterly”, Vol. 10, No. 2, *Islam & Politics*, Apr. 1988.

## Teori

Fundamentalisme merupakan fenomena yang muncul dalam setiap tradisi agama-agama besar di dunia, seperti Kristen, Yahudi, Islam, Hindu, dan Buddha. Dalam beberapa dekade terakhir gerakan fundamentalisme telah memainkan peran yang signifikan dalam kancah politik global, terutama interaksinya dengan demokrasi di beberapa negara. Fundamentalisme sendiri muncul karena didasari oleh beberapa faktor yang tidak hanya terkait masalah agama, tetapi juga masalah budaya, sosial-politik, serta masalah kepentingan ideologi. Sebagai sebuah ideologi, fundamentalisme lahir dengan tujuan untuk mengatur sistem politik, sumber-sumber ekonomi dan kekuasaan sosial dari suatu negara berdasarkan agama. Kelompok ini bermaksud mengganti struktur politik, institusi-institusi dan norma-norma sosial dengan hukum dan praktik keagamaan sebagai satu-satunya prinsip dasar dalam negara dan masyarakat. Fundamentalisme sendiri merupakan istilah yang muncul dari hasil perdebatan teologi Protestan di Amerika Serikat, sekitar tahun 1910–1915, dalam sebuah tulisan yang berjudul “The fundamentals: A Testimony to The Truth”. Pada tulisan tersebut istilah fundamentalisme ditujukan bagi kelompok *Evangelical Protestant* yang menafsirkan injil secara literal, percaya sepenuhnya terhadap wahyu, ketuhanan Al-Masih, mukjizat Maryam serta kepercayaan lainnya yang diyakini sebagai fundamen ajaran mereka. Kemudian gerakan fundamentalisme berubah menjadi sebuah gerakan yang menggunakan kekuatan politik sebagai alat untuk memerangi liberalisme dan sekularisme yang dianggap mengancam eksistensi agama.

Perkembangan industrialisasi yang semakin meningkat dewasa ini tidak serta merta mengubur semangat keberagaman mereka, bahkan gerakan ini semakin berkembang dengan munculnya kelompok-kelompok keagamaan yang berusaha mempertahankan ajaran mereka dari serangan modernisasi dan liberalisasi. Pada taraf masyarakat negara berkembang, perubahan sosial yang dibawa oleh modernisasi bukan merupakan sebuah proses dari dalam tetapi didorong oleh kekuatan asing berupa kolonialisme dan imperialisme Eropa yang bersekutu dengan kaum elite lokal yang kemudian memunculkan benih-

benih perlawanan dari kelompok keagamaan sebagai dampak dari modernisasi. Dalam melakukan perlawanan terhadap hegemoni sekularisasi tersebut, gerakan fundamentalisme kerap menggunakan simbol dan doktrin keagamaan yang dimaknai sedemikian rupa untuk kepentingan politik. Sebagai konsekuensinya, demi mempertahankan *symbols and belief* tersebut, kelompok fundamentalis kerap menggunakan berbagai cara untuk mewujudkan cita-citanya politiknya, baik dengan ekstremisme ataupun membawa sakralitas agama dalam ranah politik.

Memang, kebangkitan fundamentalisme di beberapa negara tidak terlepas dari pengaruh modernisasi yang tengah berkembang. Dalam pandangan Basam Tibi, modernisasi sendiri memiliki dua dimensi. Pertama, *cultural modernity*, bahwa seseorang mempunyai kebebasan untuk memenuhi keinginannya. Kedua, *institutional modernity*, yakni ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan instrumen penting dalam kehidupan. Kedua dimensi tersebut yang sejatinya dapat menciptakan kesejahteraan sosial, namun di beberapa negara berkembang justru melahirkan konsumerisme dan materialisme yang merupakan simbol sekularisme sehingga telah menciptakan batas-batas komunal dan sektarian. Menurut Nikki Keddie, terdapat beberapa cara sekularisasi yang dilakukan oleh rezim sekuler di beberapa negara, antara lain menurunkan kendali atau pengaruh agama terhadap berbagai dimensi kehidupan, peningkatan pemisahan negara dari agama serta peningkatan pengaturan sekular terhadap lembaga-lembaga dan adat istiadat yang sebelumnya bersifat keagamaan, dan meningkatkan jumlah orang dalam kepercayaan dan perilaku sekuler. Di tengah arus sekularisasi yang tidak terkendali tersebut, masyarakat cenderung untuk mengelompokkan diri dalam identitas-identitas utama, seperti agama, suku maupun wilayah. Fundamentalisme agama, baik dalam Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, dan Buddha, menjadi salah satu varian dalam pencarian identitas tersebut. Gerakan ini menawarkan sebuah sistem alternatif di tengah kegagalan tatanan sosial yang ada.

Demokrasi sebagai sistem politik yang tengah berkembang dengan beberapa prinsip kebebasan dan keterbukaan, telah memberikan

ruang bagi kelompok fundamentalis untuk mewujudkan cita-cita sosial-politiknya. Di bawah kekuasaan rezim sekular yang represif, gerakan ini berposisi terhadap struktur kekuasaan untuk melepaskan diri dari penindasan dan tekanan. Bahkan, sebagian kelompok melibatkan kekerasan untuk memperjuangkan kepentingannya. Beberapa kasus yang terjadi pada masa kolonialisme menunjukkan bahwa perang terbuka atau pemberontakan, baik secara langsung atau tidak kerap dilakukan oleh kelompok fundamentalisme dalam melawan dominasi politik kolonial. Hingga pada masa pascakolonialisme, kelompok fundamentalis kerap melakukan perlawanan—ideologi atau fisik—terhadap pemerintahan negara yang baru merdeka. Seperti, kasus yang terjadi di India, Pakistan, Sri Lanka, dan Indonesia.

Pada perkembangan selanjutnya, di mana demokrasi menjadi sistem politik dominan di beberapa negara pascakolonial, gerakan fundamentalisme terkadang muncul dengan peran ganda, sebagai kolaborator bagi pemerintah, dengan berperan dalam lembaga-lembaga sosial dan pendidikan, di sisi lain menjadi oposisi pemerintah atau menjadi partai politik terselubung. Peran gerakan fundamentalisme dalam kancah politik kerap berbenturan dengan sistem demokrasi itu sendiri. Karenanya, menurut Jhos Luis Marty, “Fundamentalism opposes all forms of democracy”. Hal tersebut dikarenakan beberapa alasan, antara lain, demokrasi dalam setiap bentuknya senantiasa mengedepankan toleransi dan kesetaraan. Semua warga negara mempunyai hak yang sama dalam partisipasi politik. Dalam pandangan Robert Dahl, terdapat beberapa pilar yang menjadi syarat utama demokrasi, di antaranya, kebebasan dan keterbukaan. Konsep tersebut jelas berbeda dengan ajaran fundamentalisme agama yang cenderung eksklusif dan intoleransi. Memang sepanjang sejarah, demokrasi memiliki perbedaan konsep dengan agama itu sendiri. Aturan dan nilai yang terdapat dalam agama merupakan titah Tuhan yang tertuang dalam teks suci. Sementara itu, demokrasi bersifat sekular dengan mengedepankan prinsip-prinsip kebebasan tanpa memandang agama, ras, atau paham politik. Perbedaan yang paling mendasar adalah bahwa

aturan-aturan dalam demokrasi dapat berubah, sedangkan aturan atau doktrin agama bersifat tetap. Konsep inilah akhirnya yang memisahkan sistem demokrasi dengan gerakan politik berbasis agama (fundamentalisme). Namun demikian, konsep demokrasi sendiri sebenarnya terdapat dalam ajaran-ajaran agama, seperti, toleransi, musyawarah, kesetaraan, dan sebagainya.

Kendati gerakan fundamentalisme identik dengan fanatisme, eksklusif, dan antidemokrasi. Namun, banyak tokoh fundamentalis yang justru bersikap terbuka dan menyerukan pentingnya toleransi dan perdamaian. Mahatma Gandhi, misalnya, walaupun kerap menyuarakan ajaran fundamentalisme Hindu, namun mampu berjuang tanpa senjata dan pertumpahan darah. Begitu juga, tidak semua gerakan fundamentalisme dapat dicap sebagai gerakan radikal karena banyak gerakan serupa yang justru antikekerasan dan menyerukan perdamaian serta kerja sama antarumat beragama.

## **Fundamentalisme Agama di India, Sri Lanka, dan Turki**

### ***A. Hindu di India***

Sekularisme dikenal sebagai suatu komponen utama bagi filosofi kebijakan dan identitas nasional India. Namun, dalam konteks demokrasi India penerapan sekularisme ternyata mendapat banyak ganjalan. Pertama, kuil di India ternyata memiliki pengaruh sosial ekonomi luar biasa bagi kehidupan masyarakat sehingga memaksa negara ikut campur. Dalam konteks pilar politik demokrasi India, pemerintah memang mengajukan dalih bahwa pengawasannya terhadap kuil tidak bermaksud untuk merusak prinsip sekularisme, sebagai intervensi terhadap agama, atau pemerintah hanya mengatur satu agama (Hindu), melainkan lebih dimaksudkan untuk menangani kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam organisasi kuil. Kedua, persoalan kasta telah memaksa negara campur tangan untuk mengatasi implikasinya. Dalam paham masyarakat India—sampai kini dalam realitasnya—terdapat kasta terendah yang disebut *untouchable caste* karena kontak fisik dengan mereka dianggap dapat menimbulkan pencemaran ritual. Pola kemasyarakatan ini membawa implikasi negatif

terhadap mobilitas mereka sehingga mereka pun menjadi kelompok kasta terbelakang lain atau *other backward castes* (OBC). Mereka terutama dominan di negara bagian Uttar Pradesh, Rajashtan, Bihar, Madya Pradesh, Haryana. Sementara di wilayah selatan: West Bengal, Andra Pradesh, Tamil Nadu. Sekitar 84% mereka tinggal di desa sebagai buruh tani. Realitas tidak manusiawi ini “memaksa” pemerintah mengganti pelabelan mereka dengan sebutan kasta yang sudah ditentukan (*scedule caste*) atau kaum *Harijan* (anak-anak Tuhan). Bahkan, secara legal formal negara melakukan intervensi melalui konstitusi India yang mengatur banyak hal khusus terkait mereka. Selain kedua contoh mendasar tersebut, sebenarnya masih banyak dijumpai persoalan-persoalan sosio keagamaan yang secara substantif menyalahi prinsip-prinsip sekularisme, bahkan dalam banyak kasus kebijakan tersebut acapkali mengandung unsur keberpihakan kepada kehinduan.

### **Bangkitnya Fundamentalisme Keagamaan**

Pada abad ke-15 M, meskipun Muslim tidak lebih dari 25% dari total penduduk India, namun mereka mampu mendirikan kesultanan Islam Moghul yang memerintah mayoritas Hindu. Kala itu Muslim-Hindu memang berbeda dalam berbagai aspek kehidupan serta tak ada perkawinan campur antarmereka. Namun, di bawah pemerintahan Moghul itu kontak kemasyarakatan Hindu-Muslim berjalan baik, terutama dalam sektor ekonomi. Bahkan, pada *Sepoy Mutiny* tahun 1857, yang dikenal sebagai perang kemerdekaan pertama bagi India, kaum Hindu berperan aktif mendukung gerakan nasionalisme yang dikomandani penguasa Moghul itu.

Tentu tidak dimustahilkan bahwa elemen fundamentalisme Hindu dalam derajat tertentu sudah ada di era Moghul. Namun, fundamentalisme Hindu mulai tampil terutama di era kolonialisme Inggris. Pasca-*Sepoy Mutiny* peran Moghul dilucuti dan sebaliknya Inggris kian mendominasi dengan menanamkan logika demokrasi yang berpijak pada pentingnya suara mayoritas. Penyuntikan kultur baru dalam logika politik India ini akhirnya merusak logika harmoni antarkomunitas, termasuk dalam konteks kaum

Hindu dan umat Muslim. Muslim yang dari sisi jumlah minoritas tentu termarginalkan dalam logika demokrasi yang berpijak pada suara mayoritas. Sebaliknya, kaum Hindu di tengah kultur demokrasi dengan logika mayoritas menentukan pelan tetapi pasti akhirnya mengalami degradasi kepekaan *sosio cultural* dan harmoni, yang terbangun sejak era Moghul. Bahkan, *Congress National India* (baca: Partai Kongres) yang dibentuk sejak 1887 misalnya, meskipun secara formal dideklarasikan sekuler, tetapi terminologi yang dipakai, bahkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan akhirnya diwarnai aspirasi Hindu “secara pekat”. Realitas ini menumbuhkan friksi antara dua komunitas yang berujung pada pecahnya anak benua itu menjadi dua negara: India mayoritas Hindu dan Pakistan mayoritas Islam pada tahun 1947.

Kaum fundamentalis Hindu membentuk *Rastriya Swayamsevak Sangh (National Volunteer Corps)* tahun 1925 menyusul konflik Hindu-Muslim tahun 1920-an. Tujuannya untuk mempromosikan nilai-nilai dan kepentingan Hindu berdasarkan cerita sejarah Mahabarata, Ramayana, dan lain-lain. Oleh karena itu, sejak awal didirikannya organisasi itu memang punya perasaan anti-Muslim serta benci terhadap pemimpin Hindu yang dianggap memiliki keberpihakan pada semangat kehinduan secara tipis, seperti yang dituduhkan kepada Mahatma Gandhi yang akhirnya mereka bunuh. Logika benci terhadap umat Islam India kian dibangun seiring lepasnya Pakistan. Kondisi permusuhan “sistemik” ini diperparah oleh kecemburuan Hindu terhadap jumlah Muslim India yang terus membengkak. Jika di tahun 1950-an jumlah Muslim tinggal 10%, angka itu terus meningkat menjadi 11,21% di tahun 1971, dan 13% pada tahun 1981, bahkan di penghujung abad 20 menjadi terbesar kedua setelah Indonesia dengan angka mencapai 15% dari total penduduk India. Kenaikan ini terjadi bukan saja faktor kelahiran, lebih dari itu yang paling menyakitkan bagi mayoritas Hindu adalah banyaknya kalangan *Harijan* menjadi Muslim.

Dapat dipahami jika sejak awal 1960-an kerusuhan anti-Muslim telah meningkat tajam. Kekerasan terutama ditujukan pada kawasan Muslim hidup makmur, seperti di Jabalbur,

Jamshedpur, Bhiwandi, Banaras, Ahmadabad, dan Muradabad. Dari strategi itu target terakhir yang ingin dicapai adalah untuk memarginalkan Muslim, baik dalam pengertian populasinya maupun dari sisi ekonominya.

Pemerintah India tak mampu berbuat banyak, sebab aparat kepolisian kenyataannya didominasi elemen-elemen RSS. Dominasi ini bukan sekadar akibat Hindu memang mayoritas, sebab dari segi persentase pun tidak merefleksikan proporsionalitas. Di provinsi paling padat, Uttar Pradesh–India Utara, tempat berdirinya Masjid Babri Ayodhya misalnya, jumlah Muslim yang menjadi *Provincial Armed Constabulary* = PAC (polisi anti-huru hara) hanya 300 orang dari sekitar 200.000 anggota. Artinya, Muslim yang merupakan 15% dari komposisi penduduk Uttar Pradesh, hanya mendapatkan jatah 0,15% dari jabatan kepolisian yang ada.

### **B. Buddha di Sri Lanka**

Fundamentalisme agama Buddha di Sri Lanka berkaitan erat dengan bangkitnya kekuatan identitas nasional Buddhisme Sinhala yang menginginkan Pulau Sri Lanka menjadi negeri eksklusif bagi pemeluk Buddha. Dalam Kitab Sejarah (*mythohistory*) Sri Lanka, yakni *Dipavamsa* dan *Mahavamsa*, tema utama yang dipaparkan adalah identifikasi Pulau Sri Lanka sebagai “Pulau Dhamma” (*dhammadipa*), yakni negeri bagi Buddhisme.<sup>3</sup>

*“When the Guide of the World, having accomplished the salvation of the whole world and having reached the utmost stage of blissful rest, was lying on the bed of his nibbana, in the midst of the great assembly of gods, he, the great sage, the greatest of those who have speech, spoke to Sakka who stood there near him: ‘Vijaya, son of king Sihabahu, is come to Lanka from the country of Lala, together with seven hundred followers. In Lanka, O lord of gods, will my religion be established, therefore carefully protect him with his followers and Lanka.’”*

Dua epik inilah yang dijadikan landasan perjuangan Buddhisme Sinhala dalam mem-

pertahankan *dhammadipa* Sri Lanka meskipun menggunakan jalan kekerasan ketimbang jalan perdamaian sebagaimana ajaran Buddha yang lebih mengedapankan pasifisme. Resistensi atas klaim *dhammadipa* ini muncul dari kelompok Tamil yang juga mengklaim wilayah utara Sri Lanka sebagai tanah bagi komunitas Tamil Hindu. Pertarungan atas klaim “tanah suci” ini berujung pada pertarungan politik yang mengakibatkan kerusuhan antara etnis Buddha Sinhala dan Hindu Tamil yang menewaskan ribuan jiwa sejak tahun 1957.

### **Bangkitnya Fundamentalisme Buddha Sinhala**

Dalam pembahasan mengenai perang dalam Buddhisme, muncul perdebatan mengenai fundamentalisme Buddha. Fundamentalisme menekankan pada gerakan kembali ke fundamental Buddhisme, yang berarti menggunakan kekerasan sebagai salah satu cara untuk melindungi Dhamma. Mahinda Deegalle berargumen bahwa fundamentalisme tidak hanya mengandung elemen Buddha, namun termasuk juga nasionalisme Sinhala yang merujuk Buddhisme sebagai simbol dari identitas dan warisan Sinhala.<sup>4</sup> Senada dengan pemahaman ini, Martin E. Marty dan R. Scott Appleby menegaskan bahwa komunitas fundamentalis agama, cenderung merujuk pada bahasa nasionalisme dan bangsa fundamentalis dilandasi oleh ruang teritorial dan sosial yang diwarisi dari kejayaan masa religius pramodern.

Dalam studi yang dilakukan oleh Stanley J. Tambiah dijelaskan mengenai kebangkitan Buddhisme. Dalam hal ini, kebangkitan Buddha Sinhala berkaitan erat dengan gerakan anti-Kristen yang dipimpin oleh biksu Gunananda dan Sumangala pada pertengahan abad ke-19, didukung oleh propaganda dari kaum Theosofis yang dipimpin Kolonel Henry Steele Olcott pada 1880 dan didukung oleh ideologis seperti Anagarika Dharmapala (1864–1933). Gambaran utama kebangkitan Buddha ditunjukkan dalam beberapa bentuk: menetapkan kembali norma-norma dari kitab suci umat Buddha; membersihkan pencemaran praktik ritual

<sup>3</sup> Ven Omalpe Shobita Thero, “Sinhalese Buddhism: Religion, Culture or National Identity”, *Sri Bodhiraja Foundation*, 2009 dalam [http://www.wbf.net.cn/2ndwbfqgxxpt/wuxi/wuxi\\_ft/wuxi\\_ft\\_5/wuxi\\_ft\\_5\\_2/200903/t20090326\\_1523.html](http://www.wbf.net.cn/2ndwbfqgxxpt/wuxi/wuxi_ft/wuxi_ft_5/wuxi_ft_5_2/200903/t20090326_1523.html), diunduh pada 14 Maret 2011.

<sup>4</sup> Mahinda Deegalle, “*Therāvāda Attitudes towards Violence*”. Bath Conference on Buddhism and Conflict in Sri Lanka. *Journal of Buddhist Ethics*, Vol. 10, 2003.

non-Buddha dan manipulasi magis (aktivitas ini kemungkinan terinspirasi oleh misionaris Kristen yang melakukan pembersihan praktik-praktik penyembahan berhala); penetapan aturan-aturan yang sesuai bagi munculnya kelas menengah perkotaan dan kelompok bisnis Sinhala yang menekankan pada penyucian moralitas seksual dan etika dalam kehidupan keluarga; dan yang terpenting adalah penekanan pada kejayaan masa lampau Buddhisme dan peradaban Sinhala yang dikisahkan dalam *mythohistory Mahavamsa* dan kisah epik lainnya sebagai langkah menanamkan kepada etnis Sinhala sebuah identitas nasionalis baru dan penghargaan diri dalam menghadapi penghinaan dan ketidakberdayaan atas kekuasaan Inggris dan pengaruh misionaris Kristen.

Kebangkitan dan nasionalisme Buddha Sinhala ala Dharmapala ini didukung oleh kelas menengah dan kelompok bisnis Buddha Sinhala yang berkontribusi dalam peristiwa kerusuhan anti-Muslim pada 1915 yang diarahkan kepada lawan bisnis mereka, yakni para pengusaha dan pemilik toko Muslim yang dianggap mengeksploitasi konsumen etnis Sinhala.<sup>5</sup>

Aktivisme kaum Buddha Sinhala ini terus berkembang hingga muncul sebuah laporan pada pertengahan 1950-an yang dapat dikatakan sebagai “kitab” ideologis aktivis Buddha, yakni *The Betrayal of Buddhism* (1956) yang dipublikasikan oleh the Buddhist Committee of Inquiry. Secara esensi, the *Betrayal of Buddhism* membandingkan status misi Kristen dengan sangha Buddha di Sri Lanka, khususnya pada periode penjajahan Inggris (1796–1948) dan tahun-tahun awal kemerdekaan. Perbandingan pertama, misi Kristen memiliki struktur organisasi yang dilindungi hukum dan menikmati hak imunitas dan privilese dari Raja dalam melakukan aktivitasnya sementara sangha Buddha mengalami fragmentasi. Komponen sangha telah lama menderita dan tidak mampu memanfaatkan sumber daya ekonomi mereka dan dilarang melakukan aktivitas. Perbandingan kedua, difokuskan pada kesuksesan aktivitas misi

Protestan di bidang pendidikan yang memiliki hubungan spesial dengan pemerintah kolonial, seperti halnya gereja Katolik Roma. Sementara, aktivitas pendidikan sangha Buddha hanya mendapat sedikit dukungan dari pemerintah Inggris dan hanya sedikit sekolah Buddha Sinhala dibandingkan dengan sekolah Kristen di satu sisi dan penduduk mayoritas Sinhala Buddha.

Laporan ini kemudian menyarankan dua solusi dasar bagi ketidakberdayaan yang diderita Buddhisme dibandingkan dengan Kristen. Solusi pertama adalah pemerintah sebaiknya mengeluarkan Buddha Sasana Act yang akan membentuk Buddha Sasana Council. Dewan ini terdiri dari perwakilan sangha yang dipilih dan ditunjuk yang akan bertindak sebagai “otoritas sentral” untuk mencegah disintegrasi Buddhisme dalam kompetisi dengan misi Kristen. Mengingat di masa kolonial banyak terjadi pengambilalihan properti, tanah kuil, dan pemasukan sangha maka setiap tahunnya akan diberikan sejumlah uang kepada dewan sebagai kompensasi untuk aktivitas pendidikan sangha. Lebih lanjut, pemerintah akan menunjuk menteri agama yang akan mengurus “rehabilitasi agama-agama yang menderita di bawah kekuasaan kolonial”. Pengobatan kedua adalah penarikan sejumlah bantuan bagi sekolah Kristen dan pengambilalihan sekolah bantuan Kristen oleh negara. Kontrol dan administrasi sekolah tersebut akan dialihkan kepada pemerintah pusat dan daerah. Sebagai konsekuensinya, monopoli pendidikan Inggris yang dinikmati sekolah-sekolah Kristen dicabut. Sementara para aktivis Buddha tidak keberatan apabila pemerintah mengambil alih sekolah-sekolah Buddha mengingat mereka mengajarkan pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri dan yakin bahwa kebijakan pemerintah akan berpihak pada transmisi nilai-nilai Buddha, bahasa dan kesusasteraan Sinhala dan budaya tradisional.

### ***C. Islam di Turki***

Sejarah Turki modern yang sekuler tidak dapat dilepaskan dari peran Mustafa Kemal (yang kemudian dikenal sebagai Attaturk—Bapak Turki). Negara ini didirikan pada tahun 1923 dari sisa Dinasti Usmaniyah (*Ottoman Empire*) yang menguasai wilayah Asia Barat dan Afrika Utara. Dinasti yang berpusat di Istanbul ini dianggap

<sup>5</sup> Lihat Stanley J. Tambiah, “Buddhism, Politics, and Violence in Sri Lanka”, dalam Martin E. Marty and R. Scott Appleby (Eds.), *Fundamentalisms and the State: Remarking Politics, Economic and Militance*, (Chicago: the University of Chicago Press, 1993), hlm. 590.

oleh sebagian kalangan muslim sebagai ‘khalifah’ terakhir yang mewakili kekuatan Islam.

Attaturk adalah pemimpin gerakan nasionalis Turki yang menginginkan ‘Turki adalah Turki’. Kekalahan Dinasti Usmaniyah dalam Perang Dunia I dimanfaatkan oleh Attaturk untuk mendirikan negara Turki modern. Dia berusaha menghilangkan berbagai hal yang berkaitan dengan Dinasti Usmaniyah, terutama, lambang keislaman. Pemakaian *torbus* dilarang. Adzan atau shalat dilarang menggunakan bahasa Arab. Attaturk ingin menghapus berbagai hal non-Turki. Dia mau mengubah negara Turki yang berbeda dengan dinasti sebelumnya. Sistem negara sekuler dipilih untuk menggantikan sistem khalifah.

Sejak Republik Turki berdiri, demokrasi di sana sudah mengalami berbagai perubahan. Sistem kepartaian, misalnya, berubah dari sistem partai tunggal ke sistem multipartai. Konstitusi Turki beberapa kali mengalami amandemen. Yang terakhir, amandemen konstitusi Turki dilaksanakan pada tahun 2010. Pada perubahan 2010, kekuasaan militer yang dianggap sebagai “penjaga sekularisasi” di Turki, sudah dipangkas. Mereka tidak lagi dapat dengan leluasa melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil, yang sebelumnya pernah dilakukan sebanyak empat kali (1960, 1971, 1980, dan 1997).

Bagaimana dengan fundamentalisme Islam di Turki? Sering kali kaum fundamentalis Muslim diartikan sebagai usaha sekelompok Muslim untuk mendirikan “negara Islam”. Di Turki, pengertian “negara Islam” itu mulai timbul pada abad ke-19. Ketika Sultan Mahmud II, pada tahun 1830, mengadakan pembaharuan di Turki yang bersifat sekuler maka timbul reaksi terhadap pembaharuan tersebut. Para pemrotes menghendaki pembaharuan, tetapi berlandaskan ajaran Islam, bukan sekuler. Dengan demikian, ide “negara Islam” itu lebih merupakan reaksi terhadap pembaharuan yang bersifat sekuler.

Menjelang runtuhnya Dinasti Usmaniyah di Turki, di sana juga ada pembaharuan yang dipelopori oleh Turki Muda. Pada masa itu, ada tiga golongan yang “bertarung” dalam

kehidupan masyarakat Turki, yakni kelompok yang berorientasi Barat, Nasionalis Turki, dan Islamis. Akhirnya, kelompok Nasionalisme Turki yang menjadi pemenang sebagai dasar pembaharuan modern di bawah kendali Zia Gokalp (1875–1924) dan mencapai puncaknya pada masa Mustafa Kemal Attaturk.

Attaturk yang akhirnya menjadi Presiden pertama Turki modern, melakukan serangkaian reformasi kehidupan bermasyarakat di Turki. Dia melakukan sekularisasi dan industrialisasi, untuk menuju negara modern. Di bawah kepemimpinan Kemal Attaturk, Turki mengadopsi nilai sosial yang lebih luas, hukum formal, dan melakukan reformasi politik. Sistem sekuler diterapkan secara ketat oleh Kemal Attaturk.

Melihat keadaan ini, kelompok Muslim melakukan reaksi dengan berbagai gerakan. Gerakan Islam spiritual sampai gerakan politik di Turki tidak akan terlepas dari gerakan “Sufi Naqshabandiyah”. Naqshabandiyah Turki dapat dikaitkan dengan Maulana Halid, seorang mujaddid Naqshabandiyah di sana. Pengikutnya disebut dengan istilah “Halidi”. Ketika rezim Republik Turki berdiri, yang menjadi pemimpin Naqshabandiyah Halidi adalah Bediuzzaman Said Nursi. Dia adalah produk dari pendidikan Halidi. Said Nursi pada tahun 1909 terlibat dalam pemberontakan militer melawan penguasa Usmaniyah. Dia kemudian diasingkan ke Anatolia. Setelah tahun 1910 dia diampuni dan selanjutnya berkolaborasi dengan kelompok ‘Turki Muda’, dengan menggunakan Islam sebagai senjata melawan imperialisme dan kolonialisme. Pada Perang Dunia I, Nursi dipenjara oleh Rusia. Pada tahun 1925, dituduh terlibat dalam pemberontakan kelompok Kurdi. Pemberontakan itu sendiri dipimpin oleh Syekh Said Palu, salah seorang tokoh Naqshabandiyah. Akan tetapi, Nursi diputus bebas dan diasingkan ke wilayah pegunungan di Turki barat. Di pengasingan itu, Said Nursi membangun jaringan pengikut. Mereka adalah para tokoh dan pedagang lokal. Gerakan kemudian menyebar di kalangan para petani kelas menengah.

## Fundamentalisme Agama Dalam Politik

### A. Hindu di India

#### *Fundamentalisme Hindu dan Partai Politik: Berjuang Melalui Parlemen*

Ketika banyak pejuang RSS ditahan Indira Gandhi (tahun 1970-an) karena menentang Undang-Undang Darurat, kaum RSS yang masih minoritas dalam konstelasi politik mengubah strateginya dengan seolah memperlihatkan wajah humanis, membantu korban-korban bencana alam. Sebagai upaya perluasan pengaruh RSS membentuk 20 organisasi *underbow* dengan nama berbeda-beda yang bergerak di sekitar petani, pekerja (buruh), mahasiswa, nelayan yang akhirnya berhasil merangkul sekitar 20 juta pengikut. Setelah merasa cukup kuat, pada tahun 1980 kaum nasionalis-fundamentalis Hindu mendirikan partai Bharatiya Janata Party/Partai Rakyat Bharata untuk berebut kekuasaan melalui jalur pemilu.

Manuver politik kaum fundamentalis Hindu melalui BJP yang bersimbol bunga teratai secara konsisten mengeksploitasi primordialisme Hindu dan anti-“asing”. L.K. Advani mengkampanyekan: “Ketika kita mengambil alih New Delhi, sebuah kuil akan dibangun di Ayodhya”. Ashok Singhai, ketua *Visma Hindu Parisadhe* (Dewan Hindu Dunia) menyatakan: “Pemerintahan India berikutnya akan menjadi pemerintahan Hindu. Jika orang-orang tidak menyukainya, mereka dapat pergi ke negara mana pun yang disukainya.” Mereka menggelorakan semangat anti-Barat. Semasa pemerintahan Narashimha Rao (paruh pertama 1990-an), BJP menentang liberalisasi ekonomi yang disebutnya “menjual” India kepada asing (perusahaan multinasional). Dalam konteks Kashmir mereka juga menampilkan wajah konfrontatif. BJP menentang kemungkinan status otonomi Kashmir karena dianggap membiarkan lepasnya Kashmir dari kontrol India, kendati bukan dalam pengertian konstitusional, tetapi setidaknya dalam makna Hindurashtra (bangsa Hindu) dan Hindutva (etos Hindu). Semangat Hindutva paling kontroversial digelorakan untuk perubahan Masjid Babri dengan menimbulkan korban 10.000 orang yang mayoritas Muslim. Eksploitasi primordialisme ini, mereka berhasil meningkatkan pendukung

dalam pemilu, mulai dari 4 kursi pada tahun 1984, terus meningkat menjadi 86 (1989), 114 (1991), dan menjadi 160 (tahun 1996). Demokrasi India akhirnya mengalami dilema. Di satu sisi India yang memproklamasikan diri sebagai negara demokrasi sekuler dihadapkan pada konsekuensi sikap adil dan netral dari keterikatan primordialisme Hindunya. Di sisi lain, dalam realitas politik faktor Hindu harus dipertimbangkan untuk mencari dukungan dan atau legitimasi bagi pemerintahnya. Apa pun argumentasinya, kekecewaan golongan Hindu yang mayoritas akan mengancam stabilitas dan keamanan pemerintah.

Namun demikian, juga menjadi sebuah catatan bahwa terutama sejak abad 21, meskipun logika fundamentalisme Hindu masih menggelayut dalam logika banyak orang Hindu India, dukungan terhadap organisasi fundamentalis Hindu di era 2000-an tidak segegap gempita tahun-tahun sebelumnya. Ini terjadi karena ketika BJP tampil memerintah India paruh terakhir 1990-an mereka tak mampu mengimplentasikan berbagai retorika politik yang senantiasa dieksploitasi selama kampanye. Plus-minus faktor internal apalagi eksternal tetap menjadi pertimbangan penting dalam formulasi kebijakan. Lebih problematik lagi, tidak sedikit dari tokoh Hindu garis keras yang senantiasa menggelorakan Hindutva-Hindurashtra pada akhirnya terjebak pula dalam isu korupsi.

### B. Buddha di Sri Lanka

Dalam diskusi mengenai Buddha Sinhala dan identitas nasional, salah satu aspek penting untuk dibahas adalah peran Sangha<sup>6</sup> (*monastic order*) dalam politik Sri Lanka. Keterlibatan para biksu dalam politik bukanlah fenomena baru di Sri Lanka. Studi yang dilakukan oleh Neil DeVotta menegaskan peran biksu dalam politik Sri Lanka. Pengaruh politik para biksu dan kekuatan nasionalisme Buddha Sinhala semakin mengemuka dan puncaknya terjadi pada pemilu revolusioner 1956 yang merupakan pemilu pertama yang dimenangkan oleh kelompok penentang partai pemerintah the United National Party (UNP); yakni koalisi kekuatan *Pancha Maha Balavegaya*

<sup>6</sup> Berarti persaudaraan biksu, kata *sangha* juga ditujukan untuk sekelompok biksu.

atau Lima Kekuatan Besar yang terdiri dari guru, biksu Buddha, petani, dan buruh; yang berupaya melakukan perubahan politik. Pada saat itu, para pemimpin Sinhala dan Tamil bergabung dalam gerakan untuk mendukung program *swabasha* (bahasa mandiri) di mana bahasa Sinhala dan Tamil akan menggantikan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi negara. Namun demikian, S.W.R.D. Bandaranaike dan partainya *Sri Lanka Freedom Party* (SLFP) menyadari bahwa mereka dapat menggunakan *platform Sinhala-only* untuk mengalahkan partai UNP, dan Bandaranaike kemudian mengampanyekan slogan “*Sinhala only in twenty-four hours*”.<sup>7</sup>

Terdapat beberapa faktor yang mengilhami kebijakan *Sinhala-only policy* yang diusung kekuatan Buddha Sinhala, antara lain marginalisasi Buddhisme selama masa kolonialisme; kebijakan *divide-and-rule* penjajah Inggris yang berpihak pada minoritas Tamil; over-representasi Tamil dalam kantor pemerintahan, angkatan bersenjata, universitas dan badan-badan profesional; dan kedewasaan politik dan ekspektasi *patron-client*. Bandaranaike kemudian menjadi pemimpin dari gerakan ini. Ketika jelas terlihat bahwa partai UNP tidak akan menang atas SLFP apabila tetap mengusung kebijakan bilingualisme, para pemimpin partai akhirnya mengadopsi kebijakan *Sinhala-only*. Namun, Bandaranaike bersama partai koalisinya the Mahajana Eksath Peramuna (People’s United Front, MEP) mendapat dukungan dari para biksu. Para biksu ini mendatangi rumah-rumah warga untuk mengampanyekan MEP.

Melihat para pemimpin Sinhala berkomitmen pada kebijakan *Sinhala-only* maka muncul pula nasionalisme Tamil sebagai bentuk perlawanan terhadap nasionalisme Buddha Sinhala. S.W.R.D. Bandaranaike berpikir bahwa ia dapat mengakomodasi bahasa Tamil setelah terpilih menjadi perdana menteri, namun sayangnya ia meremehkan kekuatan di mana ia berkoalisi untuk memenangkan kursi perdana menteri. Nasionalis Buddha kemudian memaksa dirinya untuk membatalkan perjanjian dengan kelompok moderat Tamil. Para biksu Buddha berperan

penting dalam memberikan tekanan dengan memimpin aksi demonstrasi dan mogok makan menentang bahasa Tamil dan tuntutan penduduk Tamil. Puncaknya adalah pada September 1959, seorang biksu Buddha, Talduwe Somarama, menembak mati Bandaranaike, di kediaman resminya. Partai SLFP kemudian mengangkat istri Bandaranaike, Sirimavo, menjadi pemimpin partai sekaligus menjadi perdana menteri wanita pertama di dunia pada Juli 1960.

Sebagai langkah memenuhi ekspektasi para pemilih SLFP, Sirimavo Bandaranaike menerapkan kebijakan *illiberal* untuk mendapatkan dukungan dari konstituennya dan membesarkan hati nasionalis Buddha Sinhala yang berakibat pada radikalisme kaum nasionalis dan generasi muda Tamil yang kecewa dengan pemerintah. Sirimavo mengimplementasikan komitmen Buddha Sinhala dalam beragam bentuk, yakni kebijakan *Sinhala-only* diperkenalkan dalam sistem peradilan termasuk di wilayah Utara yang didominasi etnis Tamil, dan pegawai pemerintah Sinhala ditempatkan di wilayah Tamil untuk menjamin hegemoni bahasa; pegawai pemerintah dari etnis Tamil dipaksa mempelajari bahasa Sinhala agar dapat dipromosikan; kebijakan memperbanyak pegawai Sinhala diperkenalkan sebagai langkah mengurangi jumlah pegawai pemerintah dari etnis Tamil; warga Tamil diharuskan mendapat nilai tertinggi dalam ujian masuk universitas negeri; *system quota* diperkenalkan untuk meningkatkan jumlah mahasiswa Sinhala, khususnya dari wilayah pedesaan; pemerintah menghindari penyediaan sumber daya bagi warga Tamil; dan Buddhisme diberi tempat utama dalam konstitusi 1972, sekaligus menandai berakhirnya status sekuler negara Sri Lanka. Dalam 16 tahun pasca-Pemilu 1956, Sri Lanka mengalami kemunduran dari negara penganut demokrasi liberal menjadi negara etnokrasi illiberal.

Beberapa bulan setelah Pemilu 1956, terjadi kerusuhan anti-Tamil pertama. Kerusuhan selanjutnya terjadi pada 1958, 1977, dan 1981. Puncak kerusuhan terjadi pada 1983 yang dalam beberapa kesempatan dipimpin oleh para biksu. Kerusuhan tahun 1983 ini berakibat pada terjadinya konflik etnis berkelanjutan yang mengakibatkan diaspora Tamil yang berkisar dari 800.000 hingga satu juta warga Tamil meninggalkan Sri Lanka dan saat

<sup>7</sup> Lihat, Neil DeVotta, “Sinhalese Buddhist Nationalist Ideology: Implications for Politics and Conflict Resolution in Sri Lanka”, *Policy Studies*, No. 40, (Washington: East-West Center, 2007), hlm. 19.

ini memberi dukungan kepada LTTE. Sejumlah 70.000 orang tewas, dan 10.000 warga miskin dan tidak berdosa dari pihak Sinhala, Tamil, dan Muslim kehilangan tempat tinggal. Saat ini, LTTE—yang dilabeli sebagai organisasi teroris oleh Uni Eropa, India, Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Kanada—melakukan perlawanan terhadap negara radikal Sri Lanka dan bertanggung jawab atas tindakan pelanggaran HAM.

### C. Islam di Turki

Said Nursi meninggal dunia pada tahun 1960 dan para pengikutnya biasa disebut “Nurcu”. Kaum Nurcu atau biasa disebut *Nurcu cemaati* tersebar ke berbagai kalangan. Mereka ada yang memasuki dunia politik, sosial, maupun ekonomi. Mereka melakukan suatu strategi agar dapat memengaruhi kehidupan masyarakat Turki. Strategi sosial Muslim Turki itu, secara kronologis, adalah **pertama** ‘gerakan Islam spiritual’ (*a spiritual ethical Islamic movement*). Gerakan ini berusaha untuk menemukan keimanan dan keislaman, sebagai sumber norma kehidupan keseharian. Secara hati-hati, mereka berusaha melakukan dan menunjukkan identitas komunal sebagai seorang muslim. Gerakan ini berjalan sekitar seperempat abad (1925–1950). **Kedua**, ‘gerakan Islam budaya’ (*a cultural Islamic movement*). Gerakan ini menyadari Islam sebagai bentuk suatu peradaban dan mereka mencari pengaruh secara budaya dan sosial. Gerakan ini berjalan sekitar 20 tahun (1950–1970). **Ketiga**, ‘gerakan Islam politik’ (*a political Islamic movement*). Gerakan ini berusaha mencapai kekuasaan politik, baik dengan cara meningkatkan posisi tawar mereka secara ekonomi, maupun mentransformasikan diri mereka ke dalam lembaga politik negara. Gerakan itu dilakukan sejak tahun 1970 sampai sekarang. **Keempat**, ‘gerakan Islam sosial-ekonomi’ (*a socioeconomic Islamic movement*). Gerakan itu menekankan pada peran pasar, asosiasi, dan lingkungan publik, sebagai jalan untuk mentransformasikan masyarakat Islam. Gerakan ini sudah berjalan sejak tahun 1983 sampai saat ini.

Terlihat ada gradasi perjuangan kiprah umat Muslim Turki, dari kegiatan spiritual kesufian sampai gerakan sosial-ekonomi-politik. Hal itu menunjukkan adanya usaha yang terus menerus

dari kalangan Muslim untuk menunjukkan eksistensinya, di tengah gelombang sekularisasi yang diajarkan oleh Kemal Attaturk.

### Penutup

Fundamentalisme dipahami sebagai sebuah aliran yang berpegang teguh pada “fundamen” agama melalui penafsiran terhadap kitab suci agama itu secara leteralis.<sup>8</sup> Lalu, bagaimana keterkaitan demokrasi dengan fundamentalisme agama, khususnya Islam di Turki, Hindu di India, dan Buddha di Sri Lanka? Sebagaimana sudah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dalam kasus Turki, misalnya, sering kali kaum fundamentalis muslim diartikan sebagai usaha sekelompok muslim untuk mendirikan “negara Islam.” Di Turki, pengertian “negara Islam” itu mulai timbul pada abad ke-19. Ketika Sultan Mahmud II, pada tahun 1830, mengadakan pembaharuan di Turki yang bersifat sekuler sehingga timbul reaksi terhadap pembaharuan tersebut. Menjelang runtuhnya Dinasti Usmaniyah di Turki, di sana juga ada pembaharuan yang dipelopori oleh Turki Muda. Pada masa itu, ada tiga golongan yang “bertarung” dalam kehidupan masyarakat Turki, yakni kelompok yang berorientasi Barat, Nasionalis Turki, dan Islamis. Akhirnya, kelompok Nasionalisme Turki yang menjadi pemenang sebagai dasar pembaharuan modern di bawah kendali Zia Gokalp (1875–1924) dan mencapai puncaknya pada masa Mustafa Kemal Attaturk.<sup>9</sup>

Gerakan Islam spiritual sampai gerakan politik di Turki tidak akan terlepas dari gerakan “Sufi Naqshabandiyah”. Naqshabandiyah Turki dapat dikaitkan dengan Maulana Halid, seorang mujaddid Naqshabandiyah di sana. Pengikutnya disebut dengan istilah “Halidi”. Ketika rezim Republik Turki berdiri, yang menjadi pemimpin Naqshabandiyah Halidi adalah Bediuzzaman Said Nursi. Dia adalah produk dari pendidikan Halidi. Said Nursi pada tahun 1909 terlibat dalam pemberontakan militer

<sup>8</sup> *Fundamentalism*, dalam The Oxford English Dictionary, 1988. Lihat juga, Bab yang ditulis oleh M. Fakhry Ghafur.

<sup>9</sup> Lihat, Hamdan Basyar, “Demokrasi dan Fundamentalisme Islam di Turki”, dalam Indriana Kartini (Ed.), *Demokrasi dan Fundamentalisme Agama: Hindu di India, Buddha di Sri Lanka, Islam di Turki*, (Jakarta: P2P LIPI, 2011).

melawan penguasa Usmaniyyah. Dia kemudian diasingkan ke Anatolia. Setelah tahun 1910 dia diampuni dan selanjutnya berkolaborasi dengan kelompok ‘Turki Muda’, dengan menggunakan Islam sebagai senjata melawan imperialisme dan kolonialisme. Pada Perang Dunia I, Nursi dipenjarakan oleh Rusia. Pada tahun 1925, dituduh terlibat dalam pemberontakan kelompok Kurdi. Pemberontakan itu sendiri dipimpin oleh Syekh Said Palu, salah seorang tokoh Naqshabandiyyah. Said Nursi meninggal dunia pada 1960 dan para pengikutnya biasa disebut “Nurcu”. Kaum Nurcu atau biasa disebut “Nurcu cemaati” tersebar ke berbagai kalangan. Strategi sosial Muslim Turki itu, secara kronologis, adalah pertama ‘gerakan Islam spiritual’ (*a spiritual ethical Islamic movement*). Kedua, ‘gerakan Islam budaya’ (*a cultural Islamic movement*). Ketiga, ‘gerakan Islam politik’ (*a political Islamic movement*). Keempat, ‘gerakan Islam sosial-ekonomi’ (*a socioeconomic Islamic movement*). Gerakan ini sudah berjalan sejak 1983 sampai saat ini (2011).

Sementara itu, dalam kasus demokrasi dan fundamentalisme agama Hindu di India, dapat diringkaskan sebagai berikut: bahwa manuver politik BJP (Bharatiya Janata Party/Partai Rakyat Bharata) yang bersimbol Bunga Teratai secara konsisten mengeksploitasi primordialisme Hindu dan “anti-asing.” L.K. Advani mengkampanyekan: “Ketika kita mengambil alih New Delhi, sebuah kuil akan dibangun di Ayodhya.” Ashok Singhai, ketua Visma Hindu Parisadhe (Dewan Hindu Dunia) menyatakan: “Pemerintahan India berikutnya akan menjadi pemerintahan Hindu. Jika orang-orang tidak menyukainya, mereka dapat pergi ke negara mana pun yang disukainya.” Mereka menggelorakan semangat anti-Barat. Semasa pemerintahan Narashimha Rao (paruh pertama 1990-an), BJP menentang liberalisasi ekonomi yang disebutnya “menjual India kepada asing” (perusahaan multinasional). Dalam konteks Kashmir mereka juga menampilkan wajah konfrontatif. BJP menentang kemungkinan status otonomi Kashmir karena dianggap membiarkan lepasnya Kashmir dari kontrol India, kendati bukan dalam pengertian konstitusional, tetapi setidaknya dalam makna Hindurashtra (bangsa Hindu) dan Hindutva (etos Hindu). Semangat Hindutva paling kontroversial digelorakan untuk

merobohkan Masjid Babri dengan menimbulkan korban 10.000 orang, mayoritas Muslim.<sup>10</sup>

Sementara terkait “Demokrasi dan Fundamentalisme Agama dalam kasus Buddha di Sri Lanka”<sup>11</sup> dapat dikemukakan sebagai berikut. Untuk mengembalikan posisi Budhisme dalam posisi utama di negeri Sri Lanka sebagaimana kejayaan masa lampau mengakibatkan umat Buddha Sinhala muncul sebagai kekuatan dominan yang tidak segan menggunakan cara kekerasan demi mewujudkan tujuan utama mereka atas nama perlindungan terhadap Dhamma Buddha. Justifikasi kekerasan melalui ideologi *just war* digunakan kaum Buddha Sinhala untuk menggempur organisasi pemberontak LTTE yang menginginkan wilayah utara Sri Lanka menjadi negeri Tamil, terpisah dari Sri Lanka khususnya pada 1983. Kisah kepahlawanan Raja Dutugemunu dalam epik Mahavamsa menjadi landasan religius umat Buddha untuk menggelar perang dengan musuh-musuh Buddha, tidak hanya kepada Tamil, namun juga bagi orang-orang Buddha Sinhala yang dianggap telah keluar dari jalan Buddha, yang dibuktikan dengan terbunuhnya Perdana Menteri S.W.R.D. Bandaranaike (yang dianggap sebagai kolaborator dengan pihak Tamil) oleh seorang biksu. Sejak saat itulah lingkaran kekerasan mendominasi realitas politik Sri Lanka. Sebuah ironi, ajaran Buddha yang menjunjung tinggi pasifisme, ternyata permisif terhadap penggunaan kekerasan atas nama “melindungi Buddha”. Di masa mendatang, apabila pemerintah Sri Lanka tidak mengakui hak-hak minoritas dan tidak mengadopsi kebijakan yang berpihak kepada minoritas maka hal tersebut akan tetap menjadi bahaya laten bagi negeri Sri Lanka yang mengasosiasikan diri sebagai negeri kaum Buddha (*Dhammadipa*).<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Lihat Dhurorudin Mashad, “Demokrasi dan Fundamentalisme Hindu di India”, dalam Indriana Kartini (Ed.), *Demokrasi dan Fundamentalisme Agama: Hindu di India, Buddha di Sri Lanka, Islam di Turki*, (Jakarta: P2P LIPI, 2011).

<sup>11</sup> Negara ini bernama lengkap Republik Sosialis Demokrasi Sri Lanka.

<sup>12</sup> Lihat Indriana Kartini, “Demokrasi dan Fundamentalisme Buddha di Sri Lanka”, dalam Indriana Kartini (Ed.), *Demokrasi dan Fundamentalisme Agama: Hindu di India, Buddha di Sri Lanka, Islam di Turki*, (Jakarta: P2P LIPI, 2011).

## Konteks Indonesia

Dalam pembahasan tentang demokrasi dan fundamentalisme agama (Islam) dalam konteks Indonesia maka bisa dilacak ke belakang pada masa Orde Lama, yaitu ketika mengemuka perdebatan soal Piagam Jakarta dalam UUD 1945. Kelompok “Islam Politik” menuntut dimasukkannya kalimat dalam Piagam Jakarta (“kewajiban menaati syariat Islam bagi para pemeluknya”) ke dalam tubuh UUD 1945, namun ini ditolak oleh “Abangan” (kelompok non-Muslim dan kelompok Muslim-Sekuler). Namun, perdebatan itu akhirnya berakhir dengan kekalahan kelompok “Islam Politik” sehingga Piagam Jakarta pun gagal dimasukkan dalam UUD 1945. Sejak saat itu, hubungan antara kelompok “Islam Politik” (yang di kemudian hari dijuluki sebagai kelompok “Muslim fundamentalis”) dan negara (pemerintah) di Indonesia dapat dikatakan berjalan kurang harmonis. Upaya kelompok “Muslim fundamentalis” untuk meraih kekuasaan melalui “jalan demokrasi”, yaitu Pemilu 1955 pun menemui kegagalan, di mana partai-partai Islam pada pemilu tersebut hanya berhasil meraih dukungan kurang dari 50%.

Pada masa Orde Baru kelompok “Muslim fundamentalis” kembali menjadi musuh utama rezim Soeharto (1967–1998). Rezim Soeharto yang sangat militeristik menjuluki kelompok “Muslim fundamentalis” dengan sebutan seperti kelompok Ekstrem Kanan, untuk membedakan dengan kelompok Ekstrem Kiri, yaitu Komunis. Pada masa ini sekurang-kurangnya ada dua kejadian penting berkaitan dengan konflik antara negara/pemerintah/penguasa dan kelompok “Muslim fundamentalis”, yaitu Tragedi Tanjung Priok (Jakarta, 1984) dan Tragedi Talangsari (Lampung, 1989). Tragedi Priok dan Talangsari waktu itu bersumber dari pemberlakuan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam berpolitik dan berorganisasi di negeri ini. Kedua tragedi tersebut telah merenggut ratusan jiwa penduduk sipil dan kasusnya hingga tahun 2011 ini cenderung dipeti-es-kan. Namun, jauh sebelum kedua tragedi tersebut, konflik antara penguasa dan kaum “fundamentalis” di Indonesia era Orde Baru, sudah muncul sejak pengesahan Undang-Undang Perkawinan pada tahun 1970-an. Hubungan penguasa Orba dengan

kaum “Muslim fundamentalis” pada tahun 1980-an, juga diwarnai dengan munculnya rekayasa penguasa dalam hal apa yang kemudian dikenal sebagai “Komando Jihad”. Rekayasa tentang “Komando Jihad”—antara lain dalam bentuk pembajakan pesawat sipil dan peledakan Candi Borobudur—berhasil menciptakan ketakutan pada kelompok “Muslim fundamentalis”. Dengan kata lain, rezim Orde Baru berhasil menjadikan kelompok “Muslim fundamentalis” sebagai “hantu” yang sangat menakutkan bagi masyarakat pada umumnya. Sementara itu, sama halnya dengan era Orde Lama, upaya kelompok ini untuk meraih kekuasaan melalui jalan demokrasi, yaitu pada pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997, kembali menemui kegagalan. Rezim Soeharto tetap melarang pembentukan (kembali) Partai Masyumi, dan bahkan Partai Demokrasi Muslim Indonesia yang waktu itu dirancang oleh mantan Wapres M. Hatta. Sebagai gantinya, penguasa mendirikan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)—yang semula berlambang Kakbah, tetapi kemudian karena ketakutan rezim Soeharto pada Islam, diganti dengan lambang bintang yang kemudian kembali lagi ke lambang Kakbah pada era pasca-Soeharto—yang susunan pengurusnya pun ditentukan oleh penguasa, termasuk partai kaum sekuler dan non-Muslim, yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Pada era Reformasi, pada awalnya, kelompok-kelompok “Muslim fundamentalis” memperoleh kebebasan penuh untuk mendirikan organisasi mereka sendiri. Muncullah kelompok-kelompok seperti Front Pembela Islam (FPI) yang dipimpin oleh Habib Rizieq, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dipimpin oleh Ismail Yusanto (dia lebih suka menyebut dirinya sebagai “Juru Bicara” HTI), dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang pada mulanya dipimpin oleh Abu Bakar Baasyir. Di kemudian hari, Baasyir keluar dari MMI dan membentuk Jamaah Ansharut Tauhid (JAT). Di samping organisasi-organisasi tersebut, ada juga kelompok-kelompok lain seperti Kelompok Salafi, Laskar Jihad, Ikhwanul Muslimin Indonesia, dan Forum Ummat Islam (FUI), yang diketuai oleh Muhammad al-Khattath. Laskar Jihad kemudian membubarkan diri setelah “misi utama” Mereka selesai di Ambon dan Poso. Kelompok-

kelompok tersebut tidak selamanya memiliki pandangan yang seragam. Antara Baasyir dan Ja'far Umar Thalib (bekas Komandan Laskar Jihad), misalnya, sudah saling menyerang di forum-forum terbuka. Setiap kelompok juga berkonsentrasi pada bidangnya masing-masing. FPI lebih berkonsentrasi pada pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) yang menurut mereka adalah bagian dari penegakan ajaran Islam, "Amar Makruf Nahi Munkar" ("menegakkan kebaikan/kebenaran, membasmi kebatilan"). HTI lebih pada upaya menegakkan kembali "sistem Khilafiyah" ("sistem Khalifah" seperti pada zaman keemasan Islam dulu). Sementara MMI lebih berkonsentrasi pada penegakan sistem politik dan ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam.

Hampir sama dengan pada era Soeharto, pada era Reformasi, terutama pada era kepresidenan Soesilo B. Yudhoyono, kelompok "Muslim fundamentalis" cenderung mengambil sikap yang bermusuhan dengan rezim yang berkuasa, yang secara kebetulan merepresentasikan "kelompok Abangan" yang pro-Barat, khususnya Amerika Serikat. Sikap pemusuhan juga datang dari pihak penguasa. Penguasa cenderung mengidentikkan kelompok fundamentalis dengan kaum "teroris". Setiap ada aksi-aksi "terorisme" di Indonesia, kelompok "fundamentalis" selalu menjadi pihak yang "tertuduh" atau minimal dicurigai. Begitu pula sebaliknya, kaum "fundamentalis" mencurigai rezim Yudhoyono dikendalikan oleh Amerika Serikat dan bahkan Lobi Israel. Saling curiga tidak akan pernah selesai karena kedua pihak cenderung bersikap konfrontatif, padahal seharusnya ada semacam dialog di antara keduanya. Ketika politik menjadi arena adu kuat maka dialog atau diskusi cenderung diabaikan. Juga, sama dengan pada era-era sebelumnya, pada era pasca-Soeharto kelompok "Muslim fundamentalis" pun gagal untuk meraih kekuasaan melalui jalan demokrasi, baik pada Pemilu 1999, 2004, maupun 2009.

Berbeda dengan kelompok "fundamentalisme Muslim" yang cenderung mengambil posisi berlawanan dengan penguasa, kelompok "fundamentalisme Hindu dan Buddha" di Indonesia, cenderung berkompromi dengan penguasa. Namun, bukan berarti kelompok

ini, khususnya Hindu-Bali, sepi dari dinamika. Pada 1998, kelompok ini meradang, bahkan mengancam akan mendirikan negara sendiri di Bali, ketika muncul pernyataan Menpangan (waktu itu) A.M. Saefuddin yang dianggap "menghina" komunitas Hindu-Bali. Pasalnya, pada saat itu, Saefuddin mengatakan bahwa Megawati itu beragama Hindu-Bali karena pernah bersembahyang di Pura, dan karenanya kurang layak menjadi Presiden RI. Pernyataan ini pun segera saja menyulut kemarahan umat Hindu-Bali, khususnya kaum "fundamentalis". Kemudian pada 2002 dan 2004, umat Hindu-Bali juga meradang akibat kemunculan novel karya Dewi Lestari dan album musik Iwan Fals. Pasalnya, sampul novel dan album musik tersebut dianggap "menghina" agama Hindu-Bali. Baik Dewi Lestari maupun Iwan Fals kemudian setuju untuk mengubah desain sampul buku dan album tersebut.

Hampir mirip dengan kasus tersebut adalah ketika umat Buddha memprotes keras pendirian "Buddha Bar" di Jakarta pada tahun 2009. Dalam kaitan ini, sebenarnya ada "kemiripan" antara fundamentalisme Islam, Hindu, dan Buddha. Artinya, ketika ada aspek dalam ajaran agama mereka yang terusik maka mereka pun akan bangkit melawan. Adalah menjadi tugas aparat hukum dan keamanan, untuk tidak membiarkan fundamentalisme berubah menjadi kekerasan politik yang dapat mengganggu ketertiban umum.

## Daftar Pustaka

- Ahmad, Feroz. Apr. 1988. "Islamic Reassertion in Turkey". *Third World Quarterly*. Vol. 10. No. 2. *Islam & Politics*.
- Bartholomeusz, Tessa J. & Chandra R. de Silva. 1998. "Buddhist Fundamentalism and Identity in Sri Lanka". London: Suny Press.
- Deegalle, Mahinda. 2003. "Therāvada Attitudes towards Violence". Bath Conference on Buddhism and Conflict in Sri Lanka. *Journal of Buddhist Ethics*. Vol. 10.
- DeVotta, Neil. 2007. "Sinhalese Buddhist Nationalist Ideology: Implications for Politics and Conflict Resolution in Sri Lanka". *Policy Studies*. No. 40. Washington: East-West Center.
- Fundamentalism*. 1988. The Oxford English Dictionary.

Kartini, Indriana (Ed.). 2011. *Demokrasi dan Fundamentalisme Agama: Hindu di India, Buddha di Sri Lanka, Islam di Turki*. Jakarta: P2P LIPI.

Thero, Ven Omalpe Shobita. 2009. "Sinhalese Buddhism: Religion, Culture or National Identity", *Sri Bodhiraja Foundation*, dalam [http://www.wbf.net.cn/2ndwbfggxxpt/wuxi/wuxi\\_ft/wuxi\\_ft\\_5/wuxi\\_ft\\_5\\_2/200903/](http://www.wbf.net.cn/2ndwbfggxxpt/wuxi/wuxi_ft/wuxi_ft_5/wuxi_ft_5_2/200903/t20090326_1523.html)

[t20090326\\_1523.html](http://www.wbf.net.cn/2ndwbfggxxpt/wuxi/wuxi_ft/wuxi_ft_5/wuxi_ft_5_2/200903/t20090326_1523.html), diunduh pada 14 Maret 2011.

Tambiah, Stanley J. Buddhism. 1993. "Politics, and Violence in Sri Lanka", dalam Martin E. Marty and R. Scott Appleby (Eds.). *Fundamentalisms and the State: Remarking Politics, Economic and Militance*. Chicago: the University of Chicago Press.